

# Konflik Thailand-Kamboja

## Ujian bagi ASEAN

Amat logis bila Thailand menolak perundingan perbatasan dengan Kamboja diseret ke ranah formal yang sarat aturan mengikat.

DERI DAHURI

**K**ONFLIK perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas. Sejak 2008 lalu, kontak senjata antar militer kedua negara merupakan peristiwa rutin dari tahun ke tahun. Korban jiwa di kedua belah pihak pun tak terelakkan.

Memasuki 2011, baku tembak berlangsung pada 4 Februari di sekitar Candi Preah Vihear. Belasan tentara maupun warga sipil tewas diterjang peluru dan ledakan mortar dalam kontak senjata tersebut. Kedua belah pihak sama-sama tidak mau dipersalahkan. Thailand menuduh tentara Kamboja memprovokasi. Pihak Kamboja pun melontarkan pernyataan serupa.

Upaya damai dan gencatan senjata dari kedua kubu memang dilakukan. Bahkan, petinggi militer Thailand dan Kamboja bertemu untuk mencari jalan keluar. Namun, pertempuran di perbatasan kembali pecah.

Pengamat politik Pavin Chachavalpongpou dari Institute of Southeast Asian Studies yang berbasis di Singapura mengatakan konflik tidak bisa dilepaskan dari peran militer Thailand.

Secara *de facto*, mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra telah ter-

guling melalui kudeta militer pada 2006 silam. Atas dukungan militer, Abhisit Vejjajiva naik memegang jabatan PM. Namun, gerakan 'Kaus Merah' yang merupakan kaum pendukung Thaksin tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan di 'Negeri Gajah Putih'.

Selama ini 'Kaus Merah' mendesak PM Abhisit untuk menuntaskan konflik dan mengalahkan Kamboja dalam pertikaian. Apabila pemerintah Thailand terlihat lemah dalam negosiasi multilateral, PM Abhisit akan kehilangan muka.

Apalagi, PM Abhisit akan menghadapi pemilihan umum. Jika ia salah langkah, militer khawatir mendukung Thaksin bisa memenangkan pemilu dan mengalahkan Abhisit.

"Ini menjelaskan mengapa militer Thailand lebih memilih penyelesaian bilateral," tutur Pavin.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang mendukung PM Hun Sen juga tengah berancang-ancang menghadapi pemilu mendatang. Untuk mengantisipasi pemilu, partai pendukung pemerintah harus pandai mengambil hati dan simpati rakyat Kamboja.

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang menewaskan sejumlah tentara bisa menarik perhatian rakyat Kamboja. Hun Sen berharap dukungan terhadapnya tidak merosot menjelang pemilu mendatang.

**Peran ASEAN**

Lepas dari faktor domestik, konflik antara Thailand dan Kamboja terkait dengan

stabilitas kawasan. Konflik tersebut praktis menjadi tantangan yang harus dihadapi Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN). Sebab, tujuan pembentukan ASEAN selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan budaya, juga menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

Dalam penyelesaian konflik, ASEAN sejatinya memiliki perangkat yang telah disepakati. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pertama ASEAN di Bali, Februari 1976, para pemimpin ASEAN menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* alias Traktat Persahabatan dan Kerja Sama.

TAC memiliki lima butir prinsip yang mengatur hubungan sesama negara anggota ASEAN, antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritori, dan identitas semua bangsa; tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain; mengatur pertikaian dengan cara-cara damai; serta meniadakan ancaman melalui kekuatan.

Lewat butir-butir tersebut, TAC seharusnya dijadikan jembatan untuk mengatasi perbedaan, perselisihan, dan konflik secara damai. Namun dalam perjalanannya, gaung TAC tak terdengar dan seakan mati suri.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN kini tengah diuji kepiawaiannya mengatasi konflik Thailand-Kamboja.

**Kendala**

Dalam buku *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and The Problem of*

*Regional Order*, Amitav Acharya menilai negara-negara anggota ASEAN masih menggunakan cara-cara lama.

Elemen terpenting, menurutnya, adalah prinsip *non-interference* alias menghindari campur tangan sesama negara anggota. Prinsip tersebut terwujud dalam 'ASEAN Way', yaitu proses interaksi regional dan kerja sama berdasarkan kerahasiaan, informalitas, pembangunan konsensus, dan negosiasi nonkonfrontasi.

Karena itu, amat logis bila Thailand menolak perundingan perbatasan dengan Kamboja, diseret ke ranah formal yang sarat aturan mengikat. Apalagi, ada 'campur tangan' dari negara lain, yakni Indonesia.

Hal itu juga yang membuat wahana ASEAN dalam penyelesaian konflik, semisal *High Council*, tidak berjalan efektif. Setali tiga uang dengan sejumlah kerangka kerja ASEAN lainnya, seperti *Vientiane Action Programme*, *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, dan *ASEAN Convention on Counter Terrorism*.

Berkaitan dengan KTT Ke-18 ASEAN di Jakarta pada 7-8 Mei lalu, peran Indonesia sangat dinantikan untuk membuat terobosan baru, terutama dalam penyelesaian konflik Thailand-Kamboja.

"Ini merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi Indonesia. Karena ketekuaan Indonesia dalam ASEAN ini tidak hanya status sebagai ketua, Indonesia harus proaktif mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk bergerak lebih maju," tegas Bantarto Bandoro, dosen hubungan internasional Universitas Indonesia, kepada *Media Indonesia*. (Reuters/AP/Bangkok Post/1-5)

deri@mediaindonesia.com



**PEMBUKAAN KTT ASEAN:** Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berfoto bersama dengan (dari kiri) Presiden Filipina Benigno S Aquino III, Menteri Senior Singapura S Jayakumar, PM Thailand Abhisit Vejjajiva, PM Vietnam Nguyen Tan Dung, PM Kamboja Hun Sen, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Laos Thongsing Thammavong, PM Malaysia Dato' Sri Mohd Najib, dan Presiden Myanmar Thein Sein pada acara pembukaan pertemuan puncak KTT ASEAN Ke-18 tahun 2011 di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Sabtu (7/5).

## KTT ASEAN Telurkan 10 Poin Kesepakatan

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua ASEAN 2011 menyampaikan 10 poin kesepakatan para pemimpin ASEAN. Sepuluh poin itu adalah, pertama, para pemimpin ASEAN menggarisbawahi tujuan untuk membangun konektivitas ASEAN harus diwujudkan.

"Masterplan yang berkaitan dengan ASEAN Connectivity semua sependapat untuk ditindaklanjuti sehingga semua negara melakukan upaya, baik untuk membangun konektivitas di negara masing-masing maupun membangun konektivitas regional, atau ASEAN Connectivity," kata Presiden.

Konektivitas itu dilakukan dengan membangun infrastruktur, transportasi, telekomunikasi, hingga *people to people contact*. SBY berharap pembangunan konektivitas ASEAN pada saatnya nanti tidak hanya akan menggerakkan ekonomi regional, mobilitas barang, jasa, dan manusia, tetapi juga dapat mengurangi kesenjangan di antara negara-negara ASEAN.

Ketahanan energi dan pangan, lanjut SBY, menjadi poin kedua. Pemimpin ASEAN merasakan pada tingkat dunia terdapat gejala harga pangan dan minyak bumi yang tinggi. "Pada enam bulan terakhir terdapat kenaikan yang sistematis," kata Presiden.

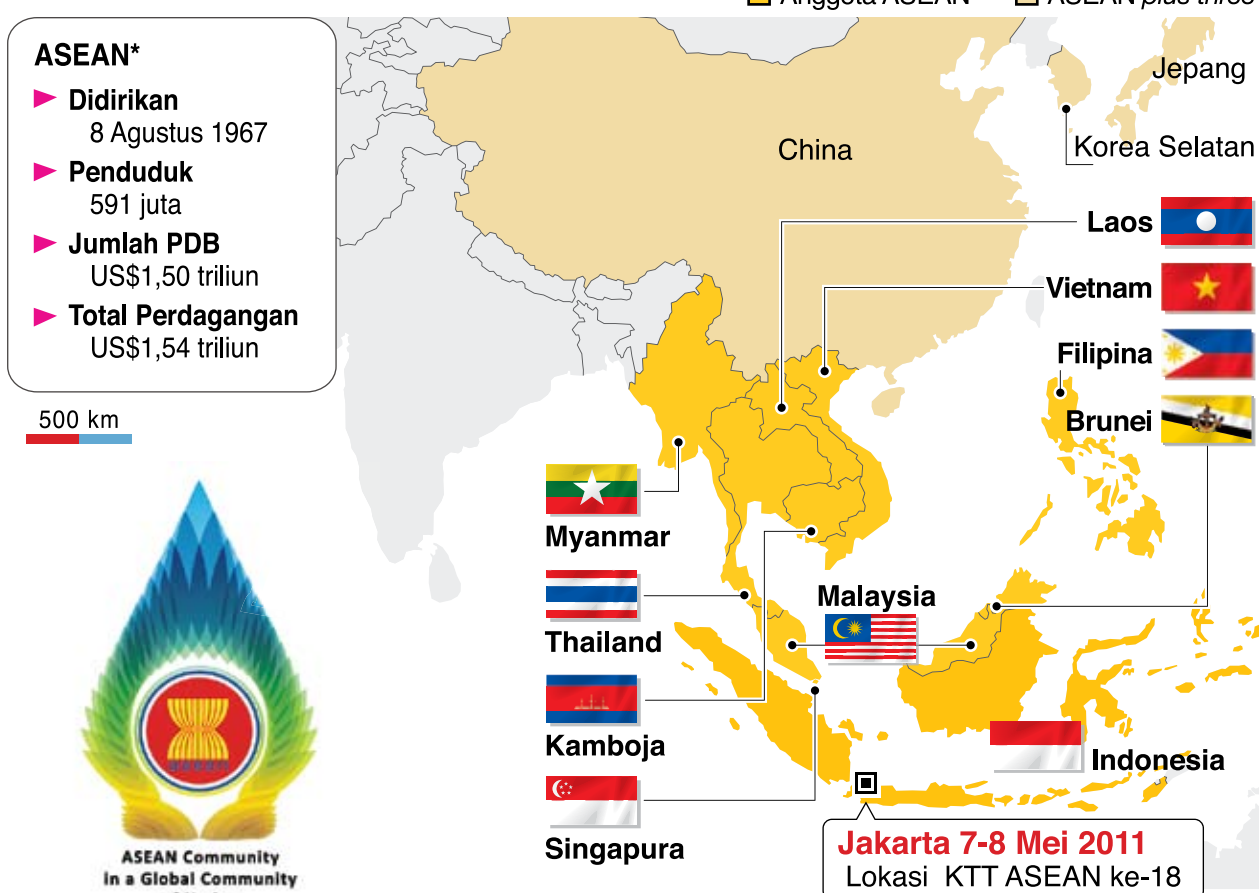
Pemimpin ASEAN bersepakat melakukan kerja sama

### Sepuluh Isu Utama KTT ASEAN Ke-18

1. Para pemimpin ASEAN menggarisbawahi tujuan untuk membangun konektivitas ASEAN.
2. Ketahanan energi dan pangan.
3. Pengelolaan resolusi konflik.
4. Perancangan kerangka kerja sama regional.
5. ASEAN harus menjadi *people-centered association*.
6. Pemimpin ASEAN sepakat untuk bekerja sama dalam penanganan bencana alam.
7. Kerja sama sub kawasan ASEAN.
8. Pembahasan persiapan East Asia Summit yang pertama dengan dua anggota baru, yaitu AS dan Rusia.
9. Membahas keinginan Timor Leste menjadi anggota ASEAN.
10. Pembahasan pertukaran waktu ketekuaan ASEAN antara Laos dan Myanmar.

Sumber: Tim MI/GRAFIS:THYOK

### KTT ASEAN



### PDB PER KAPITA\*

(US\$)	
52.872	Singapura
36.177	Brunei
12.353	Malaysia
7.944	Thailand
4.371	Indonesia
3.592	Filipina
3.124	Vietnam
2.250	Laos
1.788	Kamboja
1.138	Myanmar
4.873	ASEAN

### INVESTASI ASING LANGSUNG

Masuk: awal 2010 dalam juta US\$

3.511,8	Thailand
3.313,0	Malaysia
732,9	Filipina
313,5	Kamboja
247,9	Brunei
100,6	Laos
4.310	Vietnam
6.243,9	Indonesia
17.341	Singapura

Data Myanmar tidak tersedia  
\* Jumlah 2009. Semua data per-15 Feb 2011

### BELANJA MILITER

(Juta US\$)

7.651	Singapura
327	Brunei
3.529	Malaysia
4.336	Thailand
6.009	Indonesia
1.486	Filipina
2.410	Vietnam
18**	Laos
191	Kamboja

Data belanja militer per 2010  
\*\* 2009